

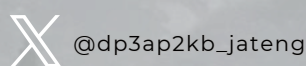
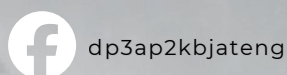
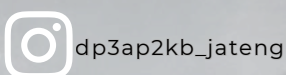


DINAS PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI JAWA TENGAH

NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2025

DINAS PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI JAWA TENGAH



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I	PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Isu-isu Strategis	2
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	4
1.4 Sistematika Penulisan	10
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	11
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	12
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	13
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	16
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	19
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	26
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2 Efisiensi Anggaran	45
3.3 Inovasi	46
3.4 Penghargaan	50

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	51
4.2 Rekomendasi	52

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- RKT Tahun 2025
- Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025
- Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jumlah Pegawai Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	4
Tabel 1.2	: Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan Tahun 2025	5
Tabel 1.3	: Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	6
Tabel 1.4	: Data Anggaran Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	9
Tabel 1.5	: Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	11
Tabel 1.6	: Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	12
Tabel 2.1	: Tujuan, Sasaran dan Target Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	14
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	15
Tabel 2.3	: Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah	17
Tabel 2.4	: Program dan Kegiatan Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	18
Tabel 2.5	: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perempuan dan Anak Tahun 2025	24
Tabel 3.1	: Skala Pengukuran Perangkat Kinerja	30
Tabel 3.2	: Capaian Kinerja Tahun 2025	31
Tabel 3.3	: Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025	33
Tabel 3.4	: Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023-2025	35
Tabel 3.5	: Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2024-2026	37
Tabel 3.6	: Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2025	39
Tabel 3.7	: Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2025	41
Tabel 3.8	: Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2025	43
Tabel 3.9	: Penggunaan Anggaran Belanja Langsung Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Aplikasi Pendukung Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	26
Gambar 2.2	: Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	26
Gambar 2.3	: Aplikasi Jogo Konco	27
Gambar 2.4	: Aplikasi Pendukung NEW SIGA BKKBN	27
Gambar 2.5	: Aplikasi Pendukung Simfoni-PPA	28
Gambar 2.6	: Aplikasi Pendukung Sweb Kampung KB	29

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkah rahmat, hidayah dan KaruniaNya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Perempuan dan Anak mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 yang diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Perempuan dan Anak melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2024 - 2026 serta Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kami berharap agar LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, 18 Februari 2026

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**



Dra. Ema Rachmawati, M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19660517 199008 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki tantangan dan permasalahan yang harus dituntaskan di Jawa Tengah antara lain terkait pemberdayaan perempuan di semua aspek bidang pembangunan, Perlindungan dan layanan penanganan kekerasan Perempuan dan Anak secara komprehensif dan lintas sektor, Pembangunan Kualitas Keluarga dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga yang sinergis, berkelanjutan dan lintas sektor.

Laporan pengukuran kinerja sebagai upaya untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dan keberhasilannya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS (pengukuran kinerja pegawai mengacu pada pengukuran kinerja instansi).

Pada akhir pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diwajibkan menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi diantaranya untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja. Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada awal tahun anggaran berkenaan. Dokumen LKJIP ini juga dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada tahun berikutnya.

1.2 Isu – Isu Strategis

Permasalahan utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Permasalahan utama/isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi :

- 1) Keterbatasan sumberdaya (SDM dan Anggaran) di Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti program dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Provinsi;
- 2) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di level Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan belum optimal yang menyebabkan capaian kinerja dalam PPE Kabupaten/Kota belum banyak yang dilevel mentor atau utama;
- 3) Kelompok kerja PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum optimal dalam mendorong, mendampingi dan mengawasi implementasi kebijakan PPRG di daerah yang menyebabkan capaian ARG di level provinsi masih 16,29% dari total pagu;

- 4) Rendahnya kapasitas, ketrampilan dan akses ekonomi serta pemasaran bagi perempuan wirausaha;
- 5) Kurangnya kapasitas perempuan di bidang politik serta kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan yang menyebabkan keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah;
- 6) Kuatnya budaya patriarki yang menghambat kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
- 7) Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di Kabupaten/Kota dalam mendukung pemenuhan indikator KLA;
- 8) Rendahnya partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan di level desa dan kecamatan;
- 9) Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kasus KDRT dan bullying;
- 10) Layanan penanganan bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang terintegrasi belum sampai pada level kecamatan;
- 11) Masih tingginya angka perkawinan usia anak;
- 12) Penggunaan media sosial dan aplikasi internet dalam interaksi di dunia maya pada masyarakat semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki gawai, sehingga menjadi tantangan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan secara online;
- 13) Masih rendahnya jumlah petugas pendamping hukum atau paralegal di level Kecamatan/desa yang berperspektif gender dan hak anak.
Permasalahan utama/isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi :
 - 1) Belum semua Kabupaten/Kota yang menyusun pedoman Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar serta mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan;
 - 2) Masih rendahnya keaktifan peran kader tribina (BKR, BKB dan BKL) dalam mendukung ketahanan keluarga;
 - 3) Masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);

- 4) Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan jumlah desa yang didampingi tidak proporsional;
- 5) Kurangnya kapasitas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dalam membantu tugas PLKB dan mendukung program KB secara komprehensif;
- 6) Masih banyaknya sekolah yang belum mengimplementasikan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugasnya ditentukan oleh kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusianya dan sarana prasarana yang mendukung sebagai penggerak roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Formasi pegawai sesuai beban tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah per 31 desember tahun 2025 sebanyak 79 orang, yang terdiri dari 57 orang PNS, 10 orang PPPK dan 12 tenaga non ASN.

Sedangkan Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

Jenis Pendidikan	PNS		PPPK		Non ASN		Total
	L	P	L	P	L	P	
SD	-	-	-	-	-	-	0
SMP	-	-	1	-	-	-	1
SMA	3	-	-	-	1	-	4
D-I	1	-	-	-	-	-	1
D-II	-	-	-	-	-	-	0
D-III	-	3	1	-	-	-	4
D-IV	-	2	1	-	-	2	5

Jenis Pendidikan	PNS		PPPK		Non ASN		Total
	L	P	L	P	L	P	
S-1	5	21	5	2	4	5	42
S-2	3	19	-	-	-	-	22
S-3	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah	12	45	8	2	5	7	79

*data per 31 Desember 2025

Kondisi tersebut sudah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, namun kualitas SDM dari masing-masing unit kerja tetap perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan, karena tantangan kedepan terkait urusan PPPA DALDUK KB dan Penunjang Pemerintahan Daerah semakin kompleks dan dinamis. Sedangkan Jumlah pegawai berdasarkan golongan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Golongan
Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Total
	ASN	12	45	57
1	I	0	0	0
2	II a	0	0	0
3	II b	0	0	0
4	II c	1	0	1
5	II d	2	1	3
6	III a	3	3	6
7	III b	2	12	14
8	III c	0	5	5
9	III d	3	11	14
10	IV a	0	10	10
11	IV b	1	2	3
12	IV c	0	0	0
13	IV d	0	1	1
	PPPK	8	2	10
1	III	1	0	1
2	VII	1	0	1
3	VIII	0	0	0
4	IX	6	2	8
	Non ASN	5	7	12
	Jumlah	13	44	79

*data per 31 Desember 2025

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas, oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah didukung sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana
Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
I	Tanah	3	-	3
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	-	1
	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1	-	1
	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	1	-	1
II	Peralatan dan Mesin			
1	Alat-Alat Besar	6	-	6
	Stationary Generating Set	4	-	4
	Stationary Water Pump	2	-	2
2	Alat-Alat Angkut	23	-	23
	Sedan	1	-	1
	Multi Purpose Vehicle (MPV)	1	-	1
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah	7	-	7
	Sepeda Motor	13	-	13
	Rescue Car	1	-	1
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	795	108	903
	Mesin Ketik Listrik	2	-	2
	Lemari Besi/Metal	46	1	47
	Filing Cabinet Besi	30	3	33
	Brandkas	1	-	1
	Lemari Kaca	2	-	2
	Alat Penyimpanan Perlengkapan KTR. Filing Cabinet	20	-	17
	Alat Penyimpanan Perlengkapan KTR. Rak Arsip	5	-	3
	CCTV - Camera Control Television System	2	-	1
	White Board	6	-	6
	Mesin Absensi	2	3	4
	Alat Pemotong Kertas	2	-	2
	White Board Electronic	1	-	1
	LCD Projector/Infocus	5	-	2
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	4	-	

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
	Papan Pengumuman	3	-	3
	Papan Tulis	1	-	1
	Alat Kantor Lainnya. LCD Proyektor	3	-	1
	Alat Kantor Lainnya. Speaker	1	-	1
	Alat Kantor Lainnya. Pompa Air Dabb	1	-	1
	Air Purifier	1		
	Meja Kerja Kayu	10	-	10
	Kursi Besi/Metal	3	-	3
	Sice	10	7	17
	Meja Rapat	49	7	53
	Ofa	1		
	Meja ½ Biro	15		
	Tempat Tidur Besi	3	-	3
	Tempat Tidur Kayu	2	-	2
	Meja Resepsionis	2	-	2
	Meja Tambahan	2	-	2
	Kursi Rapat	145	-	145
	Kursi Putar	70	23	93
	Kursi Biasa	15		
	Meja Komputer	3	-	3
	Sofa	10	-	8
	Meubliair. Rak Kayu	1	-	1
	Meubliair. Meja Kayu/Rotan	14	-	14
	Meubliair. Tikar	1	-	1
	Meubliair. Lemari Pakaian	6	-	6
	Meubliair. Lemari Kayu	2	-	2
	Meubliai. Meja Kecil	1	-	1
	Mesin Penghisap Debu/Vaccum Cleaner	-	2	2
	Lemari Es	4	1	5
	AC Sentral	9	-	9
	AC Split	35	-	28
	Kipas Angin	6	2	8
	Exhaust Fan	4	-	4
	Televisi	9	2	11
	Amplifier	7	-	7
	Equalizer	1		
	Loudspeaker	23	2	19
	Sound System	4	-	4
	Wireless	8	-	8
	Microphone	8	-	2
	Mic Conference	1	-	1
	Unit Power Supply (UPS)	1	2	3
	Stabilisator	1	-	1
	Tustel	1	-	1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
	Lambang Garuda Pancasila	4	-	4
	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	-	1
	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya/Home Use)	-	1	1
	Tangga Alumunium	3	-	3
	Dispenser	10	5	15
	Mimbar/Podium	2	-	2
	Handy Cam	1	-	1
	Bracket Standing Peralatan	1		

*data per 31 Desember 2025

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan sarana dan prasarana perlengkapan kantor sudah memadai, terutama sarana prasarana komputer. Personal komputer untuk tiap pejabat struktural dan staf sudah tersedia, namun sebagian personal komputer harus *upgrade system*, mengingat beberapa personal komputer sudah lama sehingga perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi kinerja.

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2025 memiliki Anggaran sebesar Rp.20.811.523.000 dan realisasinya sebesar Rp.18.944.079.230 (91,03%) yang digunakan untuk 10 (Sepuluh) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8. Program Perlindungan Khusus Anak
9. Program Pengendalian Penduduk
10. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Berikut data anggaran Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.4

Tabel 1.4
Data Anggaran Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.811.523.000
1	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	16.150.329.000
	Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.388.000
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.811.726.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	508.193.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	219.685.000
	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	61.862.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.973.780.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.195.000
2	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	990.325.000
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	947.357.000
	Pelebagaan Pengarustamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Provinsi	42.968.000
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.445.555.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	1.208.283.000
	Penyediaan layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memelukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	144.304.000
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup daerah Provinsi dan Lintas Daerah	92.968.000
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	93.683.000
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	33.026.000
	Penyediaan layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	60.657.000
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	596.431.000
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	575.685.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan provinsi	20.746.000
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	357.999.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	127.558.000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	154.299.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas daerah Kabupaten/Kota	76.142.000
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	112.524.000
	Pemaduan dan Sinkronasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	108.884.000
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	3.640.000
8	PROGRAM PEMBERDYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	495.661.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	435.141.000
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	60.520.000
9	PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)	479.426.000
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	442.530.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	36.896.000
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	89.590.000
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Provinsi	89.590.000

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun dengan sistematika mengacu pada Surat Gubernur Jawa Tengah Tanggal 19 Januari 2026 Nomor B/000.8.6.3/21/2026 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang, Isu Strategis, Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran, Sistematika Penulisan dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2024 dan 2025.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD, Strategi dan Arah Kebijakan, Struktur Program dan Arah Kebijakan, Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis efisiensi Anggaran, Inovasi dan Penghargaan.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 terdapat 2 (dua) saran/rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
Tahun 2025

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya agar : a. Memerintahkan kepada pejabat eselon III dan IV supaya dalam menyusun LKJ Tahun 2025 indikator dan target kinerja disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja.	Surat Perintah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor: B/700.1/3680/2025 kepada pejabat eselon III dan IV supaya dalam menyusun LKJ Tahun 2025 indikator dan target kinerja disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja. Bukti terlampir pada link https://drive.google.com/drive/folders/1dDw60tYIXQGG-Fu0txfIKZC9WaEPFHml
2	Format dokumen LKjIP Tahun 2025 supaya berpedoman pada Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun berkenaan tentang	Telah mengacu pada Surat Gubernur Jawa Tengah Tanggal 19 Januari 2026 Nomor B/000.8.6.3/21/2026 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025, lampiran

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Penyusunan LKjIP, PK dan RKT yang antara lain mencantumkan sub bab struktur program dan kegiatan pada Bab II LKjIP	Format LkjIP 2025 Bab II pada sub bab 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 terdapat 1 (satu) saran/rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya agar mengupayakan pemberian reward bukan hanya kepada pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) saja tetapi kepada pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan didukung kriteria yang jelas dan adanya Tim Penilai yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sudah mengeluarkan SK tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman Pegawai DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah nomor 002/0058 Tahun 2024 tanggal 5 Januari 2024. Bukti terlampir pada link https://drive.google.com/drive/folders/1dDw60tYIXQGG-Fu0txfIKZC9WaEPFHml

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Visi atau tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 - 2029 adalah **“Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”**. Sedangkan 6 (enam) Misi Jawa Tengah yaitu :

- 1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;**
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah turut mendukung 136 Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah yaitu mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan; Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center); serta Mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender yang berkeadilan.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD yang digunakan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 sebagaimana terangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan		Pengeluaran perempuan per kapita	10.100	10.900	10.000
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	40	40	40
2.	Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan		Rasio kekerasan terhadap perempuan	5,4	5,5	5,25
		Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	4,25	4,20	4,15
3.	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66	65	68
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	70	61	75
		Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	75	78,5	76,5
4.	Meningkatkan Keluarga Berkualitas		Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	2	2	2
		Terkendalinya Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,13	2,1	2,11
		Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
				2024	2025	2026
5.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	73,5	80	74,5
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,75	2,8	2,85
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,9	88	88,10

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 melaksanakan 5 tujuan dan 8 sasaran beserta indikator sasaran, strategi dan kebijakan, sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran jangka menengah OPD merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD dengan efektif dan efisien.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja
Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan		Pengeluaran perempuan per kapita	Ribu Rupiah	10.100
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	40
2.	Menurunkan Kekerasan Terhadap		Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000 penduduk	5,4

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Perempuan	Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000 penduduk	4,25
3.	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	66
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	70
		Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	75
4.	Meningkatkan Keluarga Berkualitas		Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	%	2
		Terkendalinya Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,13
		Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha	%	100
5.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	73,5
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,75
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,9

Dalam mencapai sasaran secara maksimal terdapat strategi dan arah kebijakan yang harus diwujudkan, yaitu :

Tabel 2.3
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Menguatkan implementasi PUG di berbagai aspek melalui pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pemenuhan hak perempuan, serta optimalisasi penyediaan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	Peningkatan dan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor-sektor strategis
2.	Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan	Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dengan prioritas pada upaya preventif serta peningkatan kualitas layanan lembaga yang terkait penanganan korban kekerasan dan TPPO 2. Penguatan Kerjasama dan kemitraan terkait perlindungan perempuan di berbagai sektor
3.	<p>Meningkatnya pemenuhan hak anak</p> <p>Meningkatkan perlindungan khusus anak</p>	<p>Meningkatkan upaya pengurangan tindak kekerasan terhadap anak dan peningkatan perlindungan khusus anak melalui KIE, penguatan kerjasama kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan layanan bagi anak korban kekerasan termasuk TPPO</p> <p>Meningkatkan pemenuhan hak anak melalui advokasi dan koordinasi lintas sektor</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan upaya perlindungan anak dan perlindungan khusus anak dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap anak serta peningkatan kualitas layanan lembaga yang terkait penanganan korban kekerasan dan TPPO 2. Penguatan Kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor
4.	<p>Terkendalnya jumlah penduduk</p> <p>Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p>	Meningkatkan kualitas pembangunan kependudukan, ketahanan keluarga serta mendorong peran serta lembaga dalam upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Peningkatan Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga mitra kerja strategis untuk mendorong KIE KB serta mendorong kebijakan terkait peningkatan kualitas dan pengendalian kuantitas penduduk melalui GDPK 5 pilar

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5.	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan	Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan melalui perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien, pengelolaan SDM dan keuangan yang profesional, pemenuhan kebutuhan sarana dan pra sarana yang mendukung kinerja, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala	Penerapan prinsip-prinsip good governance secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2.3 STRUKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Adapun anggaran Program dan indikator kinerja yang menjadi bagian dari perjanjian kinerja pejabat administrator (Eselon III) dan Sub Koordinator/Sub Bagian (Eselon IV) sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah	a. Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah b. Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	90% 50%	Rp.16.150.329.000
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	50 %	Rp 141.195.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp 12.973.780.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen	Rp 61.862.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	90 %	Rp 37.546.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90 %	Rp 450.375.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	2 Unit	Rp 12.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Rp 1.556.930.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit	Rp 381.612.000
2	Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	80%	Rp 990.325.000
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	11%	Rp 42.968.000
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya	75%	Rp 947.357.000
3	Program Perlindungan Perempuan	a. Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar b. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	31,42 % 100%	Rp 1.445.555.000
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan	52%	Rp 92.968.000
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif	100%	Rp 144.304.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	12 Kelompok	Rp 1.208.283.000
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	a. Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar b. Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	20% 22,86%	Rp 33.026.000 Rp. 60.657.000
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak	100%	Rp 33.026.000
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	100%	Rp 60.657.000
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	82,86%	Rp 596.431.000
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	4 kab/kota	Rp 575.685.000
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	20 Kelompok	Rp 20.746.000
6	Program Perlindungan Khusus Anak	a. Rasio korban kekerasan terhadap anak	11,8 per 100.000	Rp 357.559.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
		b. Persentase korban kekerasan anak terlayani	100%	
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	34,2%	Rp 76.142.000
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan komprehensif	100%	Rp 154.299.000
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya	15 kelompok	Rp 127.558.000
7	Program Pengendalian Penduduk	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	57%	Rp 112.524.000
	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	20 kab/kota	Rp 108.884.000
	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 dokumen	Rp 3.640.000
8	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	32 %	Rp 495.661.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	ASFR (Age Specific Fertility Rate)	17,7	Rp 60.520.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	30 %	Rp 435.141.000
9	Program Keluarga Berencana (KB)	a. Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR) b. Unmeetneed KB	69,47% 7,78%	Rp 479.426.000
	Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	27,5%	Rp 442.530.000
	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	10%	Rp 36.896.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	30 %	Rp 89.590.000
	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	12 %	Rp 89.590.000

2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, ada komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud sebagai dampak dari kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sebagai upaya mendorong manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah serta di ikuti dengan Perjanjian Kinerja Eselon III (Administrator/Kepala Bidang) sampai Eselon IV (Kepala Sub Bagian) dan Pejabat Fungsional (Sub Koordinator).

Guna mewujudkan kinerja tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui 27 kegiatan serta 10 program, dimana kegiatan eks BAU (rutin) sebanyak 8 kegiatan. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025, secara lengkap tercantum pada tabel dibawah :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perempuan dan Anak
Tahun 2025

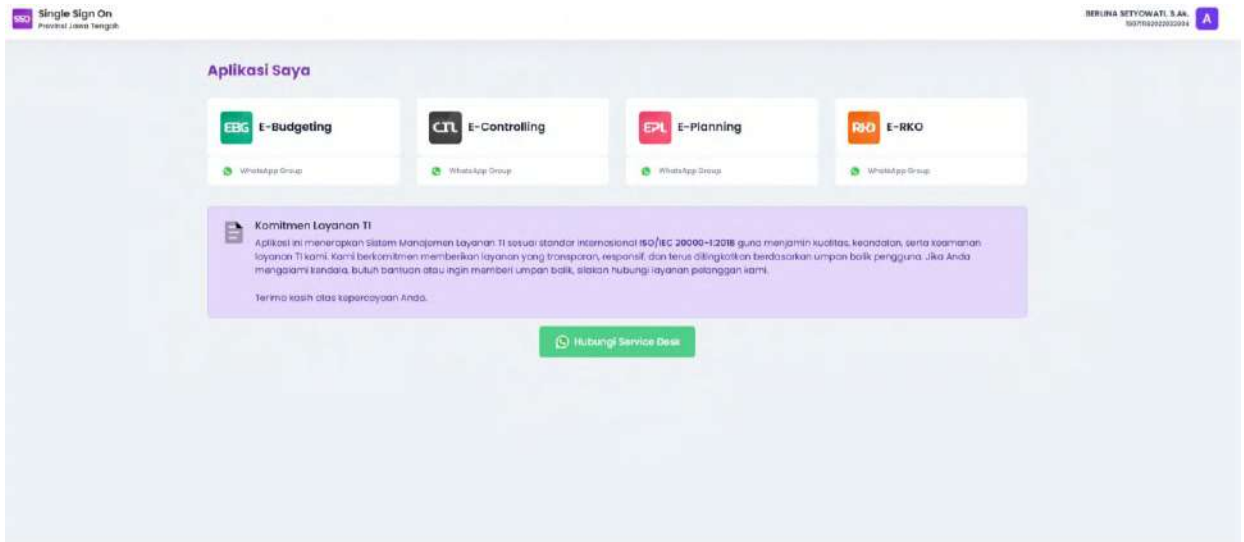
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 1 :				
1.	Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan	Pengeluaran perempuan per kapita	Ribu Rupiah	10.900
Sasaran 1 :				
1.1	Meningkatnya Peran dalam Pembangunan Perempuan	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	40
Tujuan 2 :				
2	Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	5,5 per 100.000
Sasaran 2 :				
2.1	Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	4,2 per 100.000
Tujuan 3 :				
3	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	65
Sasaran 3 :				
3.1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	61
3.2	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	78,5
Tujuan 4 :				
4	Meningkatkan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	%	100
Sasaran 4 :				
4.1	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,1

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.2	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha	%	100
Tujuan 5 :				
5	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	80
Sasaran 5 :				
5.1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,8
5.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung capaian kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menggunakan aplikasi antara lain :

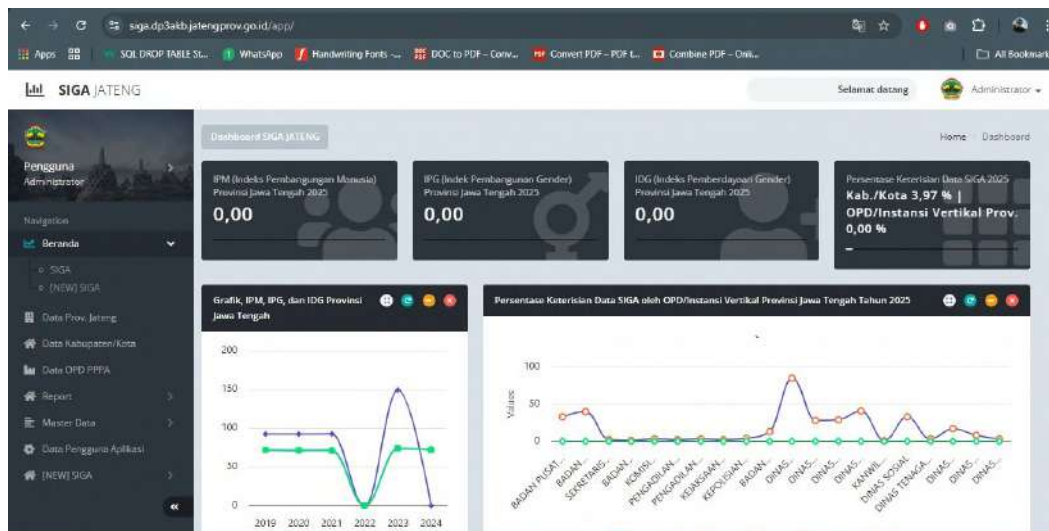
- a. Aplikasi dari Provinsi Jawa Tengah antara lain, Sistem GRMS/SSO seperti e-planning, e-budgeting, e-RKO, e-penatausahaan, serta e-controlling yang wajib digunakan untuk membantu pekerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kinerja OPD serta persuratan dan administrasi melalui Tatapraja dan Srikandi. Selain itu ada juga yang terkait Portal Data Jawa Tengah yaitu Aplikasi yang memuat data sektoral dari masing-masing OPD dan Lembaga Terkait di Jawa Tengah, seperti contoh Data Kekerasan, Kab/kota yang berpredikat KLA dan lain-lain.



Gambar 2.1

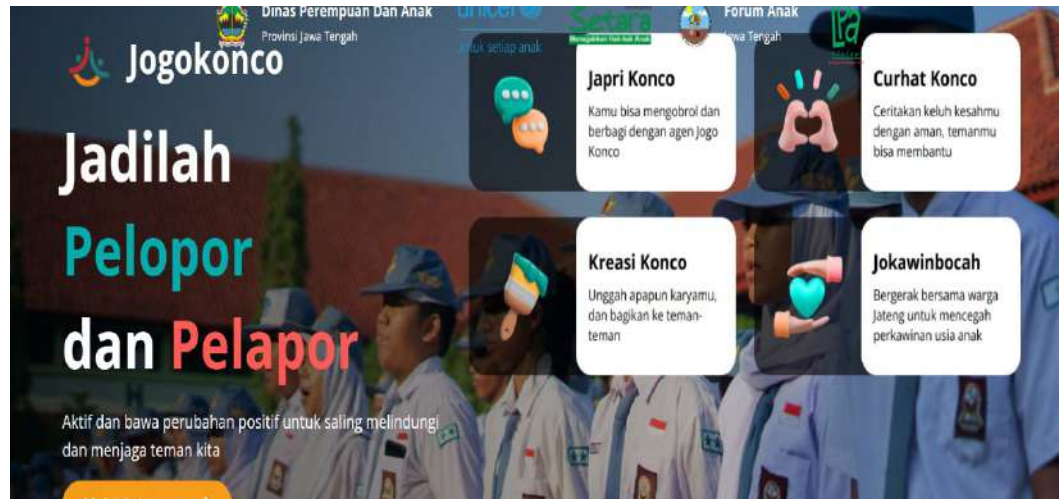
b. Aplikasi internal untuk mendukung kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain :

- Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA). Aplikasi ini mendorong adanya penyediaan data pilah gender dan anak yang dapat menjadi pedoman dalam penentuan kebijakan terkait perempuan dan anak.



Gambar 2.2

- Aplikasi Jogo Konco sebagai sarana komunikasi terkait isu-isu dan permasalahan terkait anak serta rekomendasi dan alternatif solusinya. Selain itu juga, sebagai sharing kegiatan yang dilakukan Forum Anak se-Jawa Tengah.



Gambar 2.3

- Telepon SAPA 123 untuk meningkatkan layanan perempuan dan anak korban kekerasan melalui layanan telepon/hotline 24 jam.
- c. Aplikasi dari Pusat untuk mendukung kinerja PPPA dan Dalduk KB antara lain:
 - Aplikasi New SIGA BKKBN merupakan aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pusat. Aplikasi ini digunakan untuk menunjang kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan KB (PLKB) sampai pada tingkat kecamatan dan desa.



Gambar 2.4

- Simfoni-PPA merupakan web/portal yang mendorong adanya penyediaan data terkait pencatatan korban dan kasus kekerasan yang dilaporkan dari Kementerian PPPA RI



Gambar 2.5

- Web Kampung KB adalah portal website media informasi tentang Kampung Keluarga Berkualitas secara online, Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Sebagai sebuah pendekatan pembangunan yang bersifat universal, dan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemberdayaan penguatan institusi keluarga, maka perlu didorong penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan.

Kampung KB

Topik Tabel

Klasifikasi

Jumlah Kampung KB Menurut Klasifikasi

Profil Kampung KB

Jumlah Kampung KB berdasarkan Tahun pembentukan

Jumlah Kampung KB Berdasarkan Kepemilikan Sekretariat

Jumlah Kampung KB Berdasarkan Kepemilikan Pokja

Jumlah Kampung KB Berdasarkan Regulasi

Jumlah Kampung KB Berdasarkan Kepemilikan Poktati

Jumlah Kampung KB Berdasarkan Pokja Terlatih

Jumlah Kampung KB Berdasarkan Penggunaan Data Dalam Perencanaan

Jumlah Kampung KB Berdasarkan Kepemilikan

Jumlah Kampung KB Menurut Klasifikasi

Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa

Cari

Excel

Jumlah Kampung KB Menurut Klasifikasi										
Periode :										
No	Provinsi	Dasar		Berkembang		Mandiri		Berkelanjutan		Total
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	ACEH	510	7,83	475	7,3	2.287	35,13	3.238	49,74	6.510
2	SUMATERA UTARA	994	16,26	436	7,13	1.288	21,07	3.395	55,54	6.113
3	SUMATERA BARAT	21	1,8	145	12,46	41	3,52	957	82,22	1.164
4	RIAU	791	42,48	398	21,37	196	10,53	477	25,62	1.862
5	JAMBI	184	11,6	247	15,57	285	17,97	870	54,85	1.586
6	SUMATERA SELATAN	400	12,34	581	17,92	391	12,06	1.870	57,68	3.242
7	BENGGULU	877	57,96	156	10,31	252	16,66	228	15,07	1.513
8	LAMPUNG	748	28,23	450	16,98	203	7,66	1.249	47,13	2.650

Gambar 2.6

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja, melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Perangkat Kinerja

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	> 91%;	Sangat Tinggi
2.	76 – 90,99%;	Tinggi
3.	66 – 75,99%;	Sedang
4.	51 – 65,99%;	Rendah
5.	< 50,99%	Sangat Rendah

Untuk mengukur keberhasilan atas kinerja Dinas Perempuan dan Anak dapat dilihat diantaranya melalui realisasi indikator-indikator yang ada pada sasaran strategisnya, antara lain Pengeluaran Per-Kapita Perempuan, Persentase Perempuan yang dilatih Pemberdayaan Ekonomi, Indeks Perlindungan Anak (IPA), IPHA, IPKA, Rasio Kekerasan Perempuan Dan Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), *Total Fertility Rate* (TFR), CPR, *Unmetneed*, Rasio Kekerasan Perempuan Dan Anak, UPPKA, Tribina (BKB, BKR dan BKL) dan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk. Berikut adalah uraian capaian terkait urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Persentase	
1	Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan	Pengeluaran perempuan per kapita	Ribu Rupiah	10.900	10.892*	99,93	-
1.1	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	40	66,67	166,67	-
2	Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	5,5	5,25	104,76	-
2.1	Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	4,2	5,23	80,31	-
3	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	65	73,67*	113,33	67,5
3.1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	61	71,96*	117,96	-
3.2	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	78,5	80,93*	103,09	-
4	Meningkatkan Keluarga Berkualitas	Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	%	2	2,48	124	-

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	Persentase	
4.1	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha	%	100	100	100	-
4.2	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,1	2,06	101,94	2,1
5	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	80	83,3	104,12	88,1
5.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88	91,25	103,69	89,8
5.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,8	3,06	109,28	3,08

*Capaian tahun 2024

Realisasi kinerja urusan PPPA dan Dalduk KB sudah diatas target yang ditetapkan. Indikator tujuan dan sasaran pada Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebanyak 12 indikator sudah 100% diatas target. Namun, masih ada 1 indikator yang capainnya masih di bawah 100% dan realisasi yang masih mendasarkan pada capaian tahun 2024 disebabkan belum rilisnya angka dari instansi yang berwenang (KPPPA dan BPS).

Penjabaran capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan	Pengeluaran perempuan per kapita	10.900	10.892*	99,93	Sangat Tinggi	BPS Jateng
1.1	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	40	66,67	166,67	Sangat Tinggi	Provinsi dan Kab/kota
2	Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	5,5	5,25	104,76	Sangat Tinggi	Simfoni PPA, KPPPA
2.1	Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	4,2	5,23	80,31	Sedang	Simfoni PPA, KPPPA
3	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65	73,67*	113,33	Sangat Tinggi	Kemen PPPA
3.1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61	71,96*	117,96	Sangat Tinggi	Kemen PPPA
3.2	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	78,5	80,93*	103,09	Sangat Tinggi	Kemen PPPA
4	Meningkatkan Keluarga Berkualitas	Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	2	2,48	124	Sangat Tinggi	BKKBN
4.1	Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha	100	100	100	Sangat Tinggi	DP3AP2KB

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
4.2	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,1	2,06	101,94	Sangat Tinggi	BPS Jateng, BKKBN
5	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	80	83,3	104,12	Sangat Tinggi	Inspektorat
5.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	91,25	103,69	Sangat Tinggi	DP3AP2KB
5.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,8	3,06	109,28	Sangat Tinggi	Inspektorat
Persentase Rata-rata Capaian Kinerja					109,93	Sangat Tinggi	

Capaian Kinerja Sasaran Strategis dari indikator tujuan dan sasaran Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sebesar 109,93% atau dengan kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini menunjukkan bahwa 7 indikator urusan PPPA, 3 Indikator urusan Dalduk KB dan 2 indikator urusan penunjang menunjukkan kinerja Sangat Baik.

Tabel 3.4
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 – 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan	Pengeluaran perempuan per kapita	-	10.513	-	10.100	10.892	104,09	10.900	10.892*	99,93
1.1	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	-	-	-	40	40	100	40	66,67	166,67
2	Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	5,64 per 100.000	4,64 per 100.000	121,55	5,4 per 100.000	4,38 per 100.000	123,29	5,5	5,25	104,76
2.1	Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	-	-	-	4,25 per 100.000	4,25 per 100.000	100	4,2	5,23	80,31
3	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	-	64,34	-	66	73,67*	97,48	65	73,67*	113,33
3.1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-	60,76	-	70	71,96*	86,80	61	71,96*	117,96
3.2	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	-	77,86	-	75	80,93*	103,81	78,5	80,93*	103,09

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatkan Keluarga Berkualitas	Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	-	-	-	2	4,36	218	2	2,48	124
4.1	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha	-	-	-	100	100	100	100	100	100
4.2	Terkendalnya Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,19	2,04	107,35	2,13	2,03	104,92	2,1	2,06	101,94
5	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	-	-	-	73,50	87,90	119,59	80	83,3	104,12
5.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	90,25	106,18	87,90	88,87	101,10	88	91,25	103,69
5.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	2,75	2,92	108,18	2,8	3,06	109,28

*Realisasi tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja rasio kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan capaian, karena beberapa faktor diantaranya adalah budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat sehingga kasus kekerasan masih dianggap masalah domestik rumah tangga sehingga tidak perlu dilaporkan

Pengeluaran perempuan per kapita mengalami kenaikan, dimungkinkan pengaruh faktor peningkatan pendapatan perempuan yang didorong dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat provinsi dan replikasinya di tingkat kabupaten / kota.

Pada tahun 2025, Kelompok UPPKA yang sudah didampingi sudah mampu memberikan dampak kepada anggotanya dari segi kesejahteraan. Pelatihan berupa pembuatan keripik tempe dan kecimpring waluh di Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Bloramampu membawa manfaat sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat di kelompok tersebut.

Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) berada di bawah angka 2,1 yang merupakan target ideal penduduk tumbuh seimbang, dimana setiap generasi baru dapat menggantikan generasi sebelumnya secara stabil tanpa pertumbuhan atau penurunan populasi yang drastis. Idealnya angka TFR ini didukung oleh program Keluarga Berencana yang mengarah pada pola kependudukan yang lebih stabil dan berkualitas.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2024 – 2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Capaian	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan	Pengeluaran perempuan per kapita	10.892*	10.000	108,92	Sangat Tinggi
1.1	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	66,67	40%	166,67	Sangat Tinggi
2	Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	5,25	5,25 per 100.000	104,76	Sangat Tinggi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Capaian	Tingkat Kemajuan
2.1	Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	5,23	4,15 per 100.000	80,31	Sedang
3	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	73,67*	68	108,33	Sangat Tinggi
3.1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	71,96*	75	95,95	Tinggi
3.2	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	80,93*	76,50	105,79	Sangat Tinggi
4	Meningkatkan Keluarga Berkualitas	Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	2,48	2	124	Sangat Tinggi
4.1	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha	100	100	100	Sangat Tinggi
4.2	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,06	2,11	102,43	Sangat Tinggi
5	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	83,3	74,5	111,81	Sangat Tinggi
5.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,25	88,10	103,57	Sangat Tinggi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Capaian	Tingkat Kemajuan
5.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,06	2,85	107,37	Sangat Tinggi

Beberapa realisasi kinerja indikator sudah menunjukkan progress positif terhadap capaian target akhir kinerja Renstra tahun 2024 – 2026.

Tabel 3.6
Analisis Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan	Pengeluaran perempuan per kapita	10.900	10.892*	99,93	SE Sekda Provinsi yang mewajibkan Anggaran Responsif Gender (ARG) masuk kedalam penyusunan Program dan Kegiatan di OPD, Pendampingan penyusunan ARG di OPD.	Komitmen pimpinan untuk mendorong implementasi PUG di daerah dan OPD
1.1	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	40	66,67	166,67		
2	Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	5,5	5,25	104,76	Kasus kekerasan seksual anak dan bullyng masih tinggi	Kasus kekerasan seksual anak dan bullyng masih tinggi
2.1	Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	4,2	5,23	80,31	Kolaborasi pentahelix untuk pencegahan kekerasan dilingkungan pendidikan	Kolaborasi pentahelix untuk pencegahan kekerasan dilingkungan pendidikan
3	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65	73,67*	113,33		

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
3.1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61	71,96*	117,96		
3.2	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	78,5	80,93*	103,09		
4	Meningkatkan Keluarga Berkualitas	Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	2	2,48	124	Masifnya pembentukan kampung KB baru dan advokasi untuk menuju ke tahap mandiri dan berkelanjutan sesuai Inpres nomor 3 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kampung KB	
4.1	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha	100	100	100		
4.2	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,1	2,06	101,94		
5	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	80	83,3	104,12		
5.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	91,25	103,69		
5.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	2,8	3,06	109,28		

Permasalahan utama yang terjadi saat ini di daerah adalah masih banyaknya kasus kekerasan anak dan minimnya pengetahuan tentang pengaduan. Beberapa hal yang sudah dilakukan dalam upaya pencegahan, deteksi dini, maupun penanganan, sudah dibentuk Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak agar dapat menjangkau sampai di tingkat masyarakat.

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan	10.900	10.892*	99,93				
1.1	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	40	66,67	166,67	1.023.351.000	1.018.321.656	99,5	0,5
2	Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan	5,5	5,25	104,76				
2.2	Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan	4,2	5,23	80,31	1.445.555.000	1.406.597.769	97,31	2,69
3	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak	65	73,67*	113,33				
3.1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	61	71,96*	117,96	657.088.000	657.074.760	99,99	0,01
3.2	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	78,5	80,93*	103,09	357.999.000	345.477.594	96,5	3,5

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Meningkatkan Keluarga Berkualitas	2	2,48	124				
4.1	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	100	100	495.661.000	491.891.130	99,24	0,76
4.2	Terkendalinya Jumlah Penduduk	2,1	2,06	101,94	591.950.000	591.757.924	99,97	0,03
5	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	80	83,3	104,12				
5.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	88	91,25	103,69	16.009.134.000	14.207.104.660	88,74	11,24
5.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	2,8	3,06	109,28	141.195.000	139.042.389	98,48	1,52

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah pada indikator tujuan dan sasaran telah secara efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran guna mencapai kinerja yang baik dan optimal pada tahun 2025, namun masih ada efisiensi anggaran pada Belanja Pegawai karena alokasi PPh 21 sistem TER (Tarif Efektif Rata-rata) dan pejabat yang masih kosong.

Tabel 3.8
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan	Pengeluaran perempuan per kapita	108,92	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	103,58	Menunjang
2	Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	104,76	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	245,51	Menunjang
3	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	108,33	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	100	Menunjang
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	103,44	Menunjang
				Program Perlindungan Khusus Anak (PA)	Rasio korban kekerasan terhadap anak	142,34	Menunjang
4	Meningkatkan Keluarga Berkualitas	Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	124	Program Pengendalian Penduduk (DALDUK)	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam	155,93	Menunjang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
					pembangunan		
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	121,66	Menunjang
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	94,31	Menunjang
					Unmetneed	128,61	Menunjang
5	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	111,81	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	Menunjang
					Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	Menunjang

3.2 EFISIENSI ANGGARAN

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2025, sumber dana dari APBD Murni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 20.865.188.000,00, kemudian terjadi efisiensi anggaran Rp.19.127.574.000,00 dan perubahan anggaran menjadi Rp.20.811.523.000,00. Anggaran perubahan tersebut terpilah dalam Anggaran untuk Belanja Operasi Rp. 20.706.563.000,00, Belanja Pegawai Rp.12.610.728.000,00 dan Belanja Modal Rp.104.960.000,00. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) Tahun 2025 sebesar Rp.400.660.000, terealisasi Rp. 372.393.950 (92,94%) dan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp.200.000.000,00, terealisasi Rp.199.852.000,00 (99,93%). Realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025 adalah

Rp.18.944.079.230,00 (91,03%) terjadi efisiensi Rp. 1.867.443.770,00 (8,97%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Penggunaan Anggaran Belanja Langsung
Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah
TA 2025

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	990.325.000	985.387.656	99,50
2.	Program Perlindungan Perempuan	1.445.555.000	1.406.597.769	97,31
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	93.683.000	93.584.760	99,90
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	89.590.000	86.811.348	96,90
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	596.431.000	596.424.000	100
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	357.999.000	345.477.594	96,50
7.	Program Pengendalian Penduduk	112.524.000	112.523.500	100
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	479.426.000	479.234.424	99,96
9.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	495.661.000	491.891.130	99,24
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.150.329.000	14.346.147.049	88,83
	TOTAL	20.811.523.000	18.944.079.230	91,03

Pada Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,69% dan 3,5% karena adanya penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) perlindungan perempuan dan anak menyesuaikan kebutuhan korban kekerasan. Sedangkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat efisiensi yang cukup besar yakni sebesar 11,17% Silpa pada anggaran Belanja Pegawai dan Honor Pengelola Keuangan karena alokasi PPh 21 sistem TER (Tarif Efektif Rata-rata) dan pejabat yang masih kosong.

3.3 INOVASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menciptakan beberapa inovasi-inovasi untuk menunjang capaian kinerjanya, antara lain:

1. Jo Kawin Bocah



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menginisiasi *JO KAWIN BOCAH* sebagai gerakan bersama yang masif untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak di Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengamatkan batas usia minimal menikah saat ini adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Program ini di antaranya bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan upaya pencegahan perkawinan anak di Jateng. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pemenuhan hak dan perlindungan dalam mencegah perkawinan.

2. SERAT KARTINI



Program Serat Kartini bertujuan mengembangkan kapasitas kepemimpinan perempuan melalui peningkatan kesadaran dan pemikiran kritis, kecakapan hidup, solidaritas dan pembelajaran komunitas sehingga

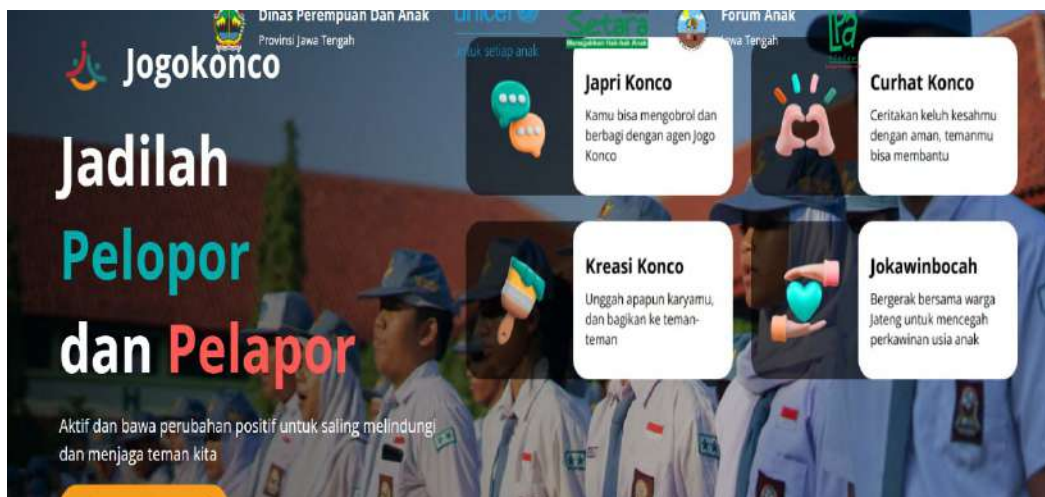
perempuan dapat menjadi pelopor perubahan sosial di lingkungan mereka, mampu memperjuangkan kesetaraan gender di keluarga, komunitas dan mendorong kebijakan pemerintah dari level bawah hingga tingkat atas.

3. CETING KETAN



Inovasi Ceting Ketang (cegah stunting kelompok rentan) dilakukan untuk mendukung penurunan stunting melalui penggerakan pelayanan KB bagi kelompok rentan (Kelompok 4 Terlalu, Miskin, Pengangguran Gelandangan Orang Terlantar, Orang Dengan Gangguan Jiwa). Sehingga kedepannya, pengendalian kelahiran dari kelompok rentan ini dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan penduduk yang berkualitas.

4. JOGO KONCO



JOGO KONCO merupakan perwujudan implementasi konsep peran anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dalam konteks Jawa Tengah. JOGO KONCO

merupakan Gerakan dari anak-anak, khususnya di Jawa Tengah untuk bersama-sama saling menjaga dan melindungi dengan menjadi Pelopor dan Pelapor.

5. NGOPI PENAK DAN PODCAST PUSPAGA



Ngobrol Topik Inspiratif Perempuan dan Anak merupakan Podcast yang diselenggarakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Jateng. Program ini mendorong kesadaran masyarakat terkait pentingnya memahami hak-hak perempuan, anak serta keluarga dan isu-isu terkini yang berdampak luas bagi masyarakat.

6. WEBSITE RAMAH DISABILITAS

Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk percepatan membangun ruang publik yang sehat dan informatif melalui website ramah disabilitas. Pada website tersebut, Kelompok rentan (disabilitas netra) dapat memanfaatkan informasi yang tersedia secara mudah dan cepat.



7. POLAH (Poling Anak Jawa Tengah)



POLAH (POLLING ANAK JAWA TENGAH) diinisiasi oleh Forum Anak Jawa Tengah untuk menggali dan mengetahui pemahaman anak mengenai isu-isu anak tertentu sebagai bahan masukan dan aspirasi yang akan Forum Anak sampaikan pada Kepala Daerah dan para pemangku kebijakan serta dalam forum Musrenbang atau penyusunan kebijakan. Hasil POLAH akan diwadahi dan diolah oleh Forum Anak Jawa Tengah (FAN Jateng) dan disampaikan kepada Gubernur, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat.

8. GETAS RANTING



Gerakan yang mengintegrasikan kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) dengan Kelurahan/Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Tengah yang ditindaklanjuti dengan Kampung Keluarga Berkualitas Ramah Perempuan dan yang Peduli Anak (Kampung KBRPPA), sehingga mudah untuk diimplementasikan dan dipahami oleh para pihak yang terlibat.

3.4 PENGHARGAAN

Penghargaan yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025, yaitu :

1. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) pada periode evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2025. Penghargaan Provila ini diraih karena Jawa Tengah dinilai berhasil mendampingi seluruh Kabupaten/Kota mendapat predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).



2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Kualitas Data Terbaik Tingkat Provinsi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, dengan peringkat terbaik III dari 38 provinsi di Indonesia.



BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Jawa Tengah dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024 - 2026.

Dengan prinsip pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana yang efektif dan efisien, maka dapat dikatakan bahwa Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melaksanakan tugasnya berhasil, hal itu dapat diukur dari seluruh target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dapat direalisasikan sesuai harapan dengan kategori **(Sangat Tinggi)**. Hal tersebut didukung data Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) rata-rata capaiannya sebesar **(109,93%)**, dengan rincian sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, dengan capaian sebesar 99,93% atau kategori **Sangat Tinggi**;
- b. Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan, dengan capaian sebesar 80,31% atau kategori **Sedang**;
- c. Meningkatnya pemenuhan hak anak, dengan capaian sebesar 117,96% atau kategori **Sangat Tinggi**;
- d. Meningkatnya perlindungan khusus anak, dengan capaian sebesar 103,09% atau kategori **Sangat Tinggi**;
- e. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan capaian sebesar 100% atau kategori **Sangat Tinggi**;
- f. Terkendalinya jumlah penduduk, dengan capaian sebesar 101,94% atau kategori **Sangat Tinggi**;
- g. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah Nilai kepuasan masyarakat, dengan capaian sebesar 103,69% atau kategori **Sangat Tinggi**;
- h. Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko perangkat daerah, dengan capaian sebesar 109,28% atau kategori **Sangat Tinggi**.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari realisasi capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana dan dukungan mitra kerja/stakeholder terkait baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Beberapa inovasi baik instrument pendukung kinerja maupun inovasi program/kegiatan yang dikembangkan oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah sudah mampu untuk menyelesaikan beberapa isu strategis yang ada terkait urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana walaupun belum optimal.

Permasalahan yang masih ada antara lain :

1. Pemberdayaan ekonomi perempuan yang sudah dilakukan Provinsi, belum ditindaklanjuti secara optimal oleh OPD Kabupaten/Kota karena keterbatasan anggaran serta kurangnya akses permodalan dan pemasaran;
2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kekerasan seksual (perempuan dan anak) serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (perempuan);
3. Belum meratanya manfaat program KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) terutama di wilayah khusus atau wilayah galciltas (tertinggal, terpencil dan terbatas) karena keterbatasan akses jangkauan dan informasi;
4. Belum semua Kabupaten/Kota yang menyusun dokumen GDPK 5 Pilar mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerahnya dan memanfaatkannya;
5. Kurangnya keaktifan dan motivasi kader tribina dalam membina keluarga anggota yang menjadi kelompoknya.

B. Rekomendasi

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan sinergitas kegiatan OPD Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan secara berkesinambungan, kerjasama dengan CSR atau lembaga untuk mendorong akses permodalan dan pemasaran.

2. Mendorong pencegahan kekerasan seksual perempuan dan anak serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara kolaboratif baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta optimalisasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan.
3. Meningkatkan sosialisasi KIE KB serta peran dan fungsi PPKBD maupun Sub PPKBD sebagai upaya mendorong peningkatan kesertaan KB terutama di wilayah pedesaan;
4. Mendorong Kabupaten/Kota untuk mengintegrasikan Grand Desain Pengendalian Kependudukan (GDPK) 5 pilar kedalam dokumen perencanaan berjenjang;
5. Meningkatkan kapasitas dan motivasi kader Tribina (BKB, BKR, BKL) sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga yang menjadi kelompok binaannya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja pada tahun-tahun kedepan.

Semarang, 18 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

LAMPIRAN



Dinas Perempuan dan Anak
Provinsi Jawa Tengah

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Ema Rachmawati, M.Hum

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gubernur Jawa Tengah,



Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K

Semarang, 1 October 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah,

Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	990.325.000	APBD-P
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp	1.445.555.000	APBD-P & DAK-NF
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	93.683.000	APBD-P
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	89.590.000	APBD-P
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	596.431.000	APBD-P
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	357.999.000	APBD-P & DAK-NF
7	Program Pengendalian penduduk	Rp	112.524.000	APBD-P
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	479.426.000	APBD-P & DAK-NF
9	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	495.661.000	APBD-P
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	16.150.329.000	APBD-P

Semarang, 1. oktober 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah,


 Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19660517 199008 2 001

Gubernur Jawa Tengah,




 Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wusani Setyaningsih, SE, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Ema Rachmawati, M.Hum

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah

Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001



Pihak Pertama

Sekretaris Dinas

Wusani Setyaningsih, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19780919 200604 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Sekretariat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	90%
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	50 %
2	Mengukur keterisian data pilah gender dari Kabupaten/Kota pada aplikasi SIGA JATENG	Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	30 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 15.615.300.000	APBD-P
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 89.590.000	APBD-P

Semarang, 1 oktober 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah

Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama

Sekretaris Dinas



Wusani Setyaningsih, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19780919 200604 2 003



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Haekal, S.Kom, MM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wusani Setyaningsih, SE, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 ~~October~~ 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas

Wusani Setyaningsih, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19780919 200604 2 003

Pihak Pertama
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Ahmad Haekal, S.Kom.MM
Penata Tingkat I
NIP. 19850202 201001 1 020

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	KEGIATAN		
1	Tersusunnya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen
2	Terlaksananya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	90 %
3	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90 %
4	Meningkatnya Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	2 unit
5	Tersedianya Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit
SUB KEGIATAN			
1	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen
2	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan
3	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 Orang
4	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket
5	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket
6	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket
8	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen
9	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Laporan
10	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	1 Dokumen
11	Tersedianya mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket
12	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit
13	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan
14	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit
16	Terlaksananya pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit
17	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit
18	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 61.862.000	APBD-P
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 37.546.000	APBD-P
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 191.742.000	APBD-P
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 12.000.000	APBD-P
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.556.930.000	APBD-P
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 381.612.000	APBD-P

Sekretaris



Wusani Setyaningsih, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19780919 200604 2 003

Semarang, 05 07 2025

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Ahmad Haekal, S.Kom.MM
Penata Tingkat I
NIP. 19850202 2010011 020



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsi No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Husna Listyati, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wusani Setyaningsih, SE, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas

Wusani Setyaningsih, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19780919 200604 2 003

Pihak Pertama
Kasubag Keuangan

Nurul Husna Listyati, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19720811 199703 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHANTAHUN 2025

Unit kerja : Sub Bagian Keuangan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	KEGIATAN		
1	Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen
2	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90 %
	SUB KEGIATAN		
1	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	61 orang
2	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen
3	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen
4	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil	1 Laporan

	penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	
5	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket
6	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.973.780.000	APBD-P
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 258.633.000	APBD-P

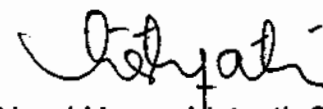
Semarang, 1 Oktober 2025

Sekretaris



Wusan Setyaningsih, SE, M. Si
Pembina
NIP. 19780919 200604 2 003

Pihak Pertama
Kasubag Keuangan



Nurul Husna Listyati, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19720811 199703 2 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ragil Wilantuko, SE, M.MKMT

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Wusani Setyaningsih, SE, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, ~~1~~ ~~oktober~~ 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Dinas

Wusani Setyaningsih, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19780919 200604 2 003

Pihak Pertama
Kasubag program

Ragil Wilantuko, SE, M.MKMT
Penata Tingkat I
NIP. 19851226 201101 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Sub Bagian Program

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	KEGIATAN		
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	50 %
2	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang difasilitasi SIGA	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	12 %
	SUB KEGIATAN		
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen
2	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan
3	Meningkatnya ketersediaan dokumen data gender dan anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	3 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 63.733.000	APBD-P
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 77.462.000	APBD-P
3. Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Rp 89.590.000	APBD-P

Semarang, 1 ~~oktober~~ 2025

Sekretaris



Wusani Setyaningsih, SE, M.Si
Pembina
NIP. 19780919 200604 2 003

Pihak Pertama
Kasubag program



Ragil Wilantuko, SE, M.MKMT
Penata Tingkat I
NIP. 19851226 201101 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Yuli Arsianto, MM

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Ema Rachmawati, M.Hum

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah

Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bidang Pemenuhan Hak
dan Perlindungan Anak

Drs. Yuli Arsianto, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680702 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Layanan Kualitas Keluarga yang terstandar	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	22,86 %
2.	Meningkatkan capaian predikat KLA Kab/Kota minimal tingkat madya	Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	82,86 %
3.	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio korban kekerasan terhadap anak	11,8 per 100.000 penduduk

Program	Anggaran	Keterangan
1. Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 60.657.000	APBD-P
2. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 596.431.000	APBD-P
3. Perlindungan Khusus Anak	Rp 203.700.000	APBD-P

Semarang, 1 October 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah



Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bidang Pemenuhan Hak
dan Perlindungan Anak

Drs. Yuli Arsianto, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680702 199803 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaidukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Isti Ilma Patriani, M.Psi

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Perlindungan Anak Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Yuli Arsianto, MM

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak


Drs. Yuli Arsianto, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680702 199803 1 004

Pihak Pertama
Ketua Kelompok Kerja
Perlindungan Anak


Isti Ilma Patriani, M.Psi
Pembina
NIP. 19830816 200912 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	KEGIATAN		
1	Meningkatnya Pemda yang menyusun Perda Pencegahan kekerasan pada anak	Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	34,2 %
2	Meningkatnya lembaga layanan perlindungan anak layanan anak memerlukan perlindungan khusus yang difasilitasi dan dikuatkan	Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya	15 Kelompok
	SUB KEGIATAN		
1	Meningkatnya jumlah lembaga yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
3	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
4	Meningkatnya Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
5	Meningkatnya memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	20 Orang
6	Meningkatnya Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	25 Orang

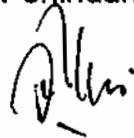
No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Meningkatnya kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 76.142.000	APBD-P & DAK-NF
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 127.558.000	APBD-P & DAK-NF

Semarang, 1 ~~Oktober~~ 2025

Pihak Kedua

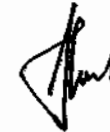
Plt. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak



Drs. Yuli Arsianto, MM
Pembina Tingkat.I
NIP. 19680702 199803 1 004

Pihak Pertama

Ketua Kelompok Kerja Pemenuhan Hak Anak



Isti Ilma Patriani, M.Psi
Pembina
NIP. 19830816 200912 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardian Agil Waskito, S.Psi

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Pemenuhan Hak Anak Dinas
Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Yuli Arsianto, MM

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa
Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 ~~October~~ 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak

Drs. Yuli Arsianto, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680702 199803 1 004

Pihak Pertama
Ketua Kelompok Kerja
Pemenuhan Hak Anak

Ardian Agil Waskito, S.Psi
Penata Tingkat I
NIP. 19880730 201101 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	KEGIATAN		
1	Meningkatnya Layanan Keluarga yang responsif gender dan anak	Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	100 %
2	Meningkatnya predikat KLA kab/kota	Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	4 Kab/Kota
3	Meningkatnya lembaga KIE Pemenuhan Hak Anak	Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	20 Kelompok
	SUB KEGIATAN		
1	Meningkatkan Layanan Kualitas Keluarga yang terstandar	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 Orang
2	Meningkatnya jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan PHA	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan	10 OPD

		berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	
3	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2 Dokumen
4	Meningkatnya peserta KIE pemenuhan hak anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan
5	Meningkatnya lembaga mitra yang berjejaring tentang peningkatan kualitas keluarga	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	2 Kegiatan

Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp	60.657.000	APBD-P
2. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Rp	575.685.000	APBD-P
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp	20.746.00	APBD-P

Semarang, 1 ~~Oktober~~ Desember 2025

Pihak Kedua

Plt. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak



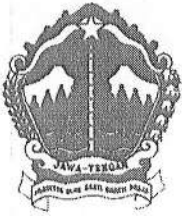
Drs. Yuli Arsianto, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680702 199803 1 004

Pihak Pertama

Ketua Kelompok Kerja Pemenuhan Hak Anak



Ardian Agil Waskito, S.Psi
Penata Tingkat I
NIP. 19880730 201101 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah

Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bidang Kesetaraan
Gender dan Perlindungan
Perempuan

Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710919 200312 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan cakupan program PPEP di daerah	Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	80 %
2	Meningkatnya perlindungan perempuan	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	31,42 %
3	Meningkatkan Layanan Kualitas Keluarga yang terstandar	Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	20 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 990.325.000	APBD-P
2. Perlindungan Perempuan	Rp 1.301.251000	APBD-P & DAK-NF
3. Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 33.026.000	APBD-P

Semarang, t ~~Oktober~~ 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah



Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama

Plt. Kepala Bidang Kesetaraan
Gender dan Perlindungan Perempuan

Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710919 200312 2 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melati Diah Pamungkas, SE,MM

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Kesetaraan Gender

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua
Plt. Kepala Bidang Kesetaraan Gender
dan Perlindungan Perempuan


Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710919 200312 2 004

Pihak Pertama
Ketua Kelompok Kerja
Kesetaraan Gender


Melati Diah Pamungkas, SE,MM
Penata Tingkat I
NIP. 19850516 200901 2 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	KEGIATAN		
1	Meningkatnya OPD yang menganggarkan ARG	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	11 %
2	Meningkatnya pemahaman perempuan dalam bidang politik dan ekonomi	Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya	75 %
3	Meningkatnya layanan keluarga yang responsif gender dan anak	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak	100 %
	SUB KEGIATAN		
1	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG)	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	2 Laporan
2	Meningkatnya perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	50 Dokumen

3	Meningkatnya jumlah peserta sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	25 Orang
4	Meningkatnya pemahaman perempuan tentang pendidikan politik	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1.330 Orang
5	Meningkatnya kesejahteraan perempuan rentan	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	3 Kelompok
6	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pewujudan KG dan perlindungan anak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	6 OPD

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Rp 42.968.000	APBD-P
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Rp 947.357.000	APBD-P
3. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Rp 33.026.000	APBD-P

Semarang, 1 ~~October~~ - 2025

Pihak Kedua

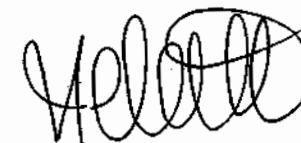
Plt. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan
Perlindungan Perempuan



Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710919 200312 2 004

Pihak Pertama

Ketua Kelompok Kerja Kesetaraan
Gender



Melati Diah Pamungkas, SE, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19850516 200901 2 010



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamulasih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dppadaidukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asteria Dewi Rusrinawati, S.Psi, M.Psi

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

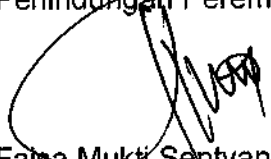
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 Oktober 2025

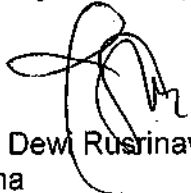
Pihak Kedua

Plt. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan
Perlindungan Perempuan


Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710919 200312 2 004

Pihak Pertama

Ketua Kelompok Kerja
Perlindungan Perempuan


Asteria Dewi Rusrinawati, S.Psi, M.Psi
Pembina
NIP. 19720814 1999012 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	KEGIATAN		
1	Meningkatnya Pemda yang menyusun Perda pencegahan kekerasan pada perempuan	Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan	52 %
2	Meningkatnya kualitas lembaga layanan perlindungan perempuan yang ditingkatkan	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	12 Kelompok
	SUB KEGIATAN		
1	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	4 Dokumen
2	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan	1 OPD

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya kab/kota yang didampingi penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan	Perindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen
4	Meningkatnya pemahaman peserta lembaga penyedia layanan kekerasan pada perempuan	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang
5	Meningkatnya kegiatan bagi perempuan dalam situasi darurat	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	25 Orang
6	Meningkatnya kab/kota yang didampingi penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 92.968.000	APBD-P
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp 1.208.283.000	APBD-P

Semarang, 1 ~~Oktober~~ 2025

Pihak Kedua

Plt. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan
Perlindungan Perempuan



Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710919 200312 2 004

Pihak Pertama

Ketua Kelompok Kerja
Perlindungan Perempuan



Asteria Dewi Rusrinawati, S.Psi, M.Psi
Pembina
NIP. 19720814 1999012 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Yuli Arsianto, MM

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi , Komunikasi Informasi dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Ema Rachmawati, M.Hum

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Dra. Ema Rachmawati, M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Drs. Yuli Arsianto, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19680702 199803 1 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Keluarga Berencana,Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kepesertaan KB di daerah	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	69,47 %
		Unmetneed	7,78 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 479.426.000	APBD-P

Semarang, 1 ~~October~~ 2025

Pihak Kedua
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan,Perlindungan Anak,Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah


Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Keluarga Berencana
Advokasi,
Komunikasi ,Informasi dan Edukasi


Drs. Yuli Arsianto, MM
Pembina Tingkat.I
NIP. 19680702 199803 1 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsi No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Gustianisari SH,MH

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Keluarga Berencana
Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Yuli Arsianto, MM

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi , Komunikasi
Informasi dan Edukasi Dinas Perempuan dan Anak Provinsi
Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 ~~Oktober~~ 2025

Pihak Kedua

Kepala Bidang Keluarga Berencana,
Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi

Drs. Yuli Arsianto, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680702 199803 1 004

Pihak Pertama

Ketua Kelompok Kerja Seksi Keluarga
Berencana

Dwi Gustianisari SH, MH
Pembina
NIP. 19760828 199703 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

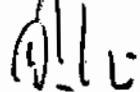
Unit kerja : Bidang Keluarga Berencana dan KIE

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Kegiatan			
1.	Meningkatnya Jumlah pengguna MKJP	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	27.5 %
2.	Meningkatnya kapasitas PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah	Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	10%
Sasaran Sub Kegiatan			
1.	Meningkatnya kepesertaan KB pada Pasangan Usia Subur	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	10 dok
2.	Meningkatnya peran serta dan kerja sama organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2 kelompok

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp 442.530.000	APBD-P
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	Rp 36.896.000	APBD-P

Semarang, 1 ~~Agustus~~ Oktober 2025

Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi,
Komunikasi Informasi dan Edukasi



Drs. Yuli Arsianto, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680702 199803 1 004

Ketua Kelompok Kerja
Keluarga Berencana



Dwi Gustianisari SH, MH
Pembina
NIP. 19760828 199703 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hayatun Nufus, S.Sos

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Advokasi, Komunikasi, Informasi
dan Edukasi Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Yuli Arsianto, MM

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi , Komunikasi
Informasi dan Edukasi Dinas Perempuan dan Anak Provinsi
Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 ~~oktober~~ 2025

Pihak Kedua

Kepala Bidang Keluarga Berencana,
Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi

Drs. Yuli Arsianto, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680702 199803 1 004

Pihak Pertama

Ketua Kelompok Kerja Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Hayatun Nufus, S.Sos
Penata
NIP. 19760419 201101 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Keluarga Berencana dan KIE

No	Sasaran Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Kegiatan			
1.	Meningkatnya Jumlah pengguna MKJP	Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	27.5%
Sasaran Sub Kegiatan			
1.	Meningkatnya peserta penggerakan advokasi dan KIE program KKBPK melalui mitra kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	7 kab/kota

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp 442.530.000	APBD-P

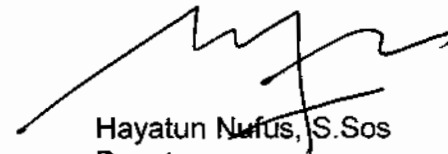
Kepala Bidang Keluarga Berencana,
Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi



Drs. Yuli Arsianto, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680702 199803 1 004

Semarang, 1 Oktober 2025

Analisis Kebijakan Ahli Muda Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi



Hayatun Nufus, S.Sos
Penata
NIP. 19760419 201101 2 002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Ema Rachmawati, M.Hum

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah

Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710919 200312 2 004



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemanfaatan GDPK dalam pembangunan	Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	57 %
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kepesertaan KB	Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	32 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengendalian Penduduk	Rp 112.524.000	APBD
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 495.661.000	APBD

Semarang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah



Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Sejahtera

Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710919 200312 2 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : V.W. Novita Dewi, S.Sos, M.Si

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Penduduk Dinas
Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 ~~oktober~~ 2025

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Sejahtera


Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710919 200312 2 004

Pihak Pertama
Ketua Kelompok Kerja Pengendalian
Penduduk


V.W. Novita Dewi, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19771112 200801 1 016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Seksi Pengendalian Penduduk Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
SASARAN KEGIATAN			
1.	Meningkatnya pemda yang mendapatkan advokasi pemanfaatan GDPK	Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	20 kab / kota
2.	Meningkatnya jumlah dokumen pelaksanaan pemaduan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 dok
SASARAN SUB KEGIATAN			
1	Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan GDPK	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	2 dok
2.	Meningkatkan pemahaman siswa SMA-MA tentang pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan	2 dok

		Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	
3.	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	1 Kab / kota
4	Meningkatnya pemahaman peserta dalam penyusunan GDPK 5 Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	2 dok
5.	Adanya dokumen profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	1 dok

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	108.884.000	APBDP
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	3.640.000	APBDP

Semarang, 1 ~~Oktober~~ 2025

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Sejahtera



Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710919 200312 2 004

Ketua Kelompok Kerja
Pengendalian Penduduk



V.W. Novita Dewi, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19771112 200801 1 016



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Idha Ariyanti, Skm.MM

Jabatan : Ketua Kelompok Kerja Keluarga Sejahtera

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 Oktober 2025

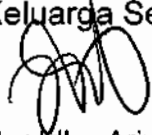
Pihak Kedua

Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Sejahtera


Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710919 200312 2 004

Pihak Pertama

Ketua Kelompok Kerja
Keluarga Sejahtera


Nur Idha Ariyanti, Skm.MM
Pembina
NIP. 19830106 200604 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Seksi Keluarga Sejahtera Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Kegiatan			
1.	Meningkatnya kelompok tribina yang aktif melaporkan kegiatan	ASFR (Age Specific Fertility Rate)	17.7
2.	Anggota UPPKA yang difasilitasi menjadi wirausaha	Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	30 %
Sasaran Sub Kegiatan			
1.	Terpenuhinya PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	1 kelompok
2.	Meningkatnya pembinaan peningkatan akses dan kualitas ketahanan keluarga dan remaja aktif	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	3 kab / kota
3.	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	2 kab / kota

4.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 laporan
5.	Meningkatnya kapasitas mitra dan ormas dalam pengelolaan program ketahanan keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2 kelompok

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 60.520.000	APBDP
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 435.141.000	APBDP

Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera



Faisa Mukti Septyani, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710919 200312 2 004

Semarang, 1 ~~Oktober~~ 2025

Ketua Kelompok Kerja
Keluarga Sejahtera



Nur Idha Ariyanti, Skn.MM
Pembina
NIP. 19830106 200604 2 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax. 7622536
e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Suprpti, ST, MM

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Ema Rachmawati, M.Hum

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah

Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis
Daerah

Eka Suprpti, ST, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730120 199803 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Unit Pelaksana Teknis Daerah

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	90 %
2	Meningkatnya layanan korban kekerasan perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %
3	Meningkatnya layanan korban kekerasan anak	Persentase korban kekerasan anak terlayani	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 535.029.000	APBD-P
2. Program Perlindungan Perempuan	Rp 144.304.000	APBD-P & DAK-NF
3. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 154.299.000	APBD-P & DAK-NF

Semarang, 1 ~~Oktober~~ 2025

Pihak Kedua

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah



Dra. Ema Rachmawati, M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19660517 199008 2 001

Pihak Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Eka Suprpti, ST, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730120 199803 2 004



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

Jl. Pamularsih No. 28 Semarang Kode Pos 50148 Telepon 7602952 Fax.
7622536

e-mail : dpppadaldukkb@jatengprov.go.id website : dp3akb.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridha Setyasih, M.Psi

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Eka Suprapti, ST, MM

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak

Eka Suprapti, ST, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730120 199803 2 004

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Ridha Setyasih, M.Psi
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19830110 201502 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit kerja : Unit Pelaksana Teknis Daerah

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Kegiatan			
1.	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	90%
2.	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90%
3.	Meningkatnya Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 unit
4.	Tersedianya Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 laporan
5.	Tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	3 unit

6.	Meningkatnya layanan korban kekerasan perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif	100%
7.	Meningkatnya layanan korban kekerasan anak	Persentase anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapat layanan komprehensif	100%
Sasaran Sub Kegiatan			
1.	terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket
2.	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket
3.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket
4.	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 laporan
5.	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 unit
6.	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Meningkatnya Jumlah Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan) / Jumlah Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	50 Orang
15.	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	35 rang

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 182.139.000	APBD-P
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 57.818.000	APBD-P
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.500.000	APBD-P
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 254.796.000	APBD-P
	Rp 38.776.000	APBD-P

- | | | | |
|--|----|-------------|--------|
| 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp | 144.304.000 | APBD-P |
| 6. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 7. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi | Rp | 154.299.000 | APBD-P |

Semarang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak



Eka Suprapti, ST, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730120 199803 2 004

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Unit Pelaksana Teknis Daerah



Ridha Setyasih, M.Psi
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19830110 201502 2 001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Tujuan 1			
1.	Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Perempuan	Pengeluaran perempuan per kapita	9.950 ribu rupiah
Sasaran 1			
1.1	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	35%
Tujuan 2			
2.	Menurunkan Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	5,5 per 100.000
Sasaran 2			
2.1	Meningkatnya pencegahan dan layanan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan	4,20 per 100.000
Tujuan 3			
3.	Meningkatkan Perlindungan Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	67
Sasaran 3			
3.1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	73
3.2	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus	76

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Anak (IPKA)	
Tujuan 4			
4.	Meningkatkan Berkualitas Keluarga	Persentase peningkatan kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan	2%
Sasaran 4			
4.1	Terkendalinya Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,12
4.2	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase peningkatan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) yang menjadi wirausaha	100%
Tujuan 5			
5.	Meningkatkan Pelaksanaan Birokrasi di Daerah	Kualitas Reformasi Perangkat (Perangkat Daerah)	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) 74
Sasaran 6			
5.1	Meningkatnya Pengelolaan Perangkat Daerah	Kualitas Risiko	Indeks Manajemen Risiko 2,80
5.2	Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah	Kualitas Perangkat	Indeks Kepuasan Masyarakat 88

Semarang, Maret 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH



Dra. RETNO SUDEWI, Apt. M.Si, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19681124 199310 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Pemuda 127-133 Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351

Semarang 50132

Surel: inspektorat@jatengprov.go.id Laman: inspektorat.jatengprov.go.id

Semarang, 6 Agustus 2025

Nomor : 700/968/PPD/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) eks.
Hal : Hasil Evaluasi atas Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
di

SEMARANG

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/7 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal;
3. Nilai hasil Evaluasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah 87,30 termasuk dalam kategori penilaian "A" (Memuaskan) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon IV/Pengawas/Subkoordinator;
4. Berdasarkan hasil evaluasi, kami memberikan saran perbaikan kepada Saudara agar:
 - a. Memerintahkan kepada pejabat eselon III dan IV supaya dalam menyusun LKJ Tahun 2025 indikator dan target kinerja disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja;

- b. Format dokumen LKjIP Tahun 2025 supaya berpedoman pada Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun berkenaan tentang Penyusunan LKjIP, PK dan RKT yang antara lain mencantumkan sub bab struktur program dan kegiatan pada BAB II LKjIP.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam membangun sistem manajemen akuntabilitas kinerja di lingkungannya dengan baik, terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang berisikan hal-hal yang lebih rinci sebagai penjelasan.

Demikian untuk segera ditindaklanjuti atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah



TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NO : 700/968/PPD/2025
TANGGAL : 6 Agustus 2025**

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
REPORT TP, SEBAB, SARAN & TINDAK LANJUT

NOMOR LHP : 700/968/PPD/2025

TANGGAL LHP : 06-08-2025

NAMA OBRİK : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

JENIS PEMERIKSAAN : SKPD Provinsi Jawa Tengah

Propinsi Jawa Tengah

No TP	Temuan Pemeriksaan	Sebab	Rekomendasi	Status Rek	Konsep Tindak Lanjut	Tindak Lanjut	Status TL	Kekurangan TL
1	<p>Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d. 100, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai 87,30 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:</p> <p>a. Perencanaan Kinerja 26,70 b. Pengukuran Kinerja 27,00 c. Pelaporan Kinerja 12,60 d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 21,00</p> <p>Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 87,30 maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori penilaian "A" (Memuaskan) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unitkerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon IV/Pengawas/Subkoordinasi.</p>	-	<p>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya agar:</p> <p>a. Memerintahkan kepada pejabat eselon III dan IV supaya dalam menyusun LKJ Tahun 2025 indikator dan target kinerja disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja;</p>	B	<p>- Surat Perintah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kepada pejabat eselon III dan IV supaya dalam menyusun LKJ Tahun 2025 indikator dan target kinerja disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja - LKJ 2025</p>			
			<p>Format dokumen LKjIP Tahun 2025 supaya berpedoman pada Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun berkenaan tentang Penyusunan LKjIP, PK dan RKT yang antara lain mencantumkan sub bab struktur program dan kegiatan pada BAB II LKjIP.</p>	B	LKjIP 2025			



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH INSPEKTORAT

Jl. Pemuda 127-133 Telp. (024) 3517283-3517284-3556230 Fax. (024) 3514351

SEMARANG 50132

Laman: <http://inspektorat.jatengprov.go.id> Surel: inspektorat@jatengprov.go.id

Semarang, 19 Juli 2024

Nomor : 700/1218/W.I/2024
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) eks.
Hal : Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
di -

SEMARANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Jawa Tengah, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Evaluasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap proses Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
3. Nilai hasil evaluasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah **87,90** termasuk dalam kategori penilaian "**A**" (**Memuaskan**) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon IV/Pengawas/Subkoordinator;
4. Berdasarkan hasil evaluasi, kami memberikan saran perbaikan kepada Saudara supaya mengupayakan pemberian *reward* bukan hanya kepada pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) saja tetapi kepada pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan didukung kriteria yang jelas dan adanya Tim Penilai yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam membangun sistem manajemen akuntabilitas kinerja di lingkungannya dengan baik, terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang berisikan hal-hal yang lebih rinci sebagai penjelasan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Inspektur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAK)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROV.
JAWA TENGAH

NO : 700/1218/W.I/2024
TANGGAL : 19 Juli 2024

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
REPORT TP, SEBAB, SARAN & TINDAK LANJUT

NOMOR LHP : 700/1218/W.I/2024

TANGGAL LHP : 19-07-2024

NAMA OBRIK :

JENIS PEMERIKSAAN : SKPD Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah

o p Temuan Pemeriksaan	Sebab	Rekomendasi	Status Rek	Konsep Tindak Lanjut	Tindak Lanjut	Status TL	Kekurangan TL
<p>Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 87,90 maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori penilaian "A" (Memuaskan) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unitkerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon IV/Pengawas/Subkoordinasi.</p>	-	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya agar mengupayakan pemberian reward bukan hanya kepada pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) saja tetapi kepada pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan didukung kriteria yang jelas dan adanya Tim Penilai yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.</p>	B	<p>Pedoman pemberian reward kepada pegawai DP3AP2KB SK Tim penilai</p>			